



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SMART CITY* UNTUK
MEMAJUKAN PARIWISATA DI KABUPATEN PURWAKARTA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Nama : Annisa Maharani Rahayu
NIM : 3312415063

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNNES pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 16 Agustus 2019

Pembimbing Skripsi

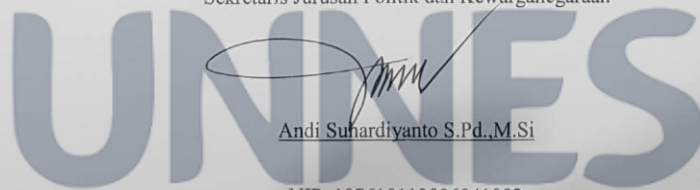


Dr. Sos. Puji Lestari, S.Pd., M.Si

NIP. 197707152001122008

Mengetahui,

Sekretaris Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



UNNES

Andi Suhardiyanto S.Pd., M.Si

NIP. 197610112006041002

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *21 Oktober 2019*

Penguji I

Dr. Ngabivanto, M.Si
NIP. 196501031990021001

Penguji II

Erisandi Arditama S.IP., M.A.
NIP. 198705012018031001

Penguji III

Dr. Sos. Puji Lestari, S.Pd., M.Si
NIP. 19770715200112208

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solehaml Mustofa M.A.
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil jiplakan atau hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 16 Agustus 2019



Annisa Maharani Rahayu

Nim. 3312415063



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya (Hobbes, 1651), manusia pada dasarnya jahat (Xun Zi), dan perlakukan orang lain sama seperti apa yang kamu ingin diperlakukan.”

Penulis (ANNISA MAHARANI RAHAYU)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua dan kakak saya, yang tidak lelah memberikan dukungan berupa doa dan material.
2. Sahabat saya David Rizaldy, Mariska, Serly, Nyu, dan Machruf.
3. Sahabat-sahabat Ilmu Politik 2015, rekan PKL 2018 Inspektorat Kabupaten Demak, KKN 2018 Desa Siwuran dan KKN 2019 Kelurahan Tanjungmas, dan IPA 3 SMAN 1 Purwakarta
4. Almaterku Universitas Negeri Semarang
5. Masyarakat Purwakarta, khususnya para pemuda Purwakarta yang juga sedang mengerjakan skripsi terkait *smart city*.

PRAKATA

Rasa syukur alhamdulillah selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Smart City* Untuk Memajukan Pariwisata Kabupaten Purwakarta”. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan dukungan dengan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang atas pemberian izin penelitian.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan arahan dalam pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Puji Lestari, S.Pd, M.Si, pembimbing skripsi yang telah membimbing dan membantu memberikan sumbangan pemikiran dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama di bangku perkuliahan. Terutama Bapak Erisandi Arditama dan Bapak Cahyo Seftyono yang selalu membimbing saya dari semester satu hingga saat ini, serta Bapak

Ngabiyanto yang selalu mendukung kegiatan akademik saya di luar kampus.

6. Bapak Iyus Permana, Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah memberikan izin untuk langsung membuat surat penelitian kepada Kesbangpol Kabupaten Purwakarta.
7. Bapak Amal Sibyan, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purwakarta yang telah memberikan izin penelitian di Dinas Pariwisata dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purwakarta.
8. Bapak Yusnaedi Rusli, selaku Ketua Bidang Aptika Diskominfo Kabupaten Purwakarta yang telah membantu selama penelitian, serta terimakasih atas motivasi yang diberikan.
9. Seluruh pegawai Diskominfo Kabupaten Purwakarta yang telah menerima dan membantu saya dengan baik selama proses penelitian.
10. Bapak Asep Yuli Mulia, selaku Kepala Seksi Produksi Dan Pengembangan Produk Wisata Disporaparbud Kabupaten Purwakarta.
11. Kak Alpiadi Prawiraningrat, selaku Koordinator *Project* Aplikasi Sampurasun yang telah membantu saya dengan baik dan meluangkan waktu selama proses pengambilan data, serta terimakasih atas motivasi yang diberikan.
12. Para pelaku UMKM Kabupaten Purwakarta, selaku informan untuk pelaku UMKM yang telah membantu saya dengan baik dan meluangkan waktu selama proses pengambilan data.

13. Kedua orang tua dan kakak saya, yang tidak lelah memberikan dukungan berupa doa dan material.
14. Para pengemudi transportasi daring Kabupaten Purwakarta yang selalu mengantarkan saya selama proses penelitian.
15. Terimakasih sahabat saya David Rizaldy, Mariska, Serly, Nyu, dan Machruf yang telah memberi warna selama di bangku perkuliahan. Semoga persahabatan kita langgeng.
16. Terimakasih sahabat saya Shielva, Raji dan Hakim yang selalu mendengarkan keluh kesah saya.
17. Rekan-rekan PKL di Inspektorat Kabupaten Demak dan seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Demak, terimakasih sudah membantu kami.
18. Keluarga besar KKN Lokasi 2018 Desa Siwuran Kabupaten Wonosobo dan KKN Alternatif 2019 Tanjungmas, terimakasih 45 yang sangat berkesan.
19. Ilmu Politik Angkatan 2015 yang telah memberikan doa dan dukungan.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai penanganan masalah-masalah sosial yang ada di setiap daerah.

Semarang, 16 Agustus 2019

Penulis

SARI

Rahayu, Annisa M. 2019. *Purwakarta Smart City: Implementasi Kebijakan Smart City Di Kabupaten Purwakarta Untuk Memajukan Pariwisata Kabupaten Purwakarta.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Puji Lestari S.Pd., M.Si. 208 Halaman

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Smart City, Faktor, Kendala

Pariwisata telah menjadi salah satu penghasil devisa terbesar di Indonesia dalam era globalisasi saat ini, salah satu kabupaten di Indonesia yang mengembangkan pariwisata pusaka adalah Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Salah satu cara yang ditawarkan agar banyak para pengunjung yang melakukan wisata ke Purwakarta adalah dengan menerapkan konsep *smart city*, *smart city* merupakan sebuah konsep yang tercipta di era globalisasi sekarang ini. Pada saat ini semua aspek kehidupan terkena dampak globalisasi, termasuk tata cara untuk membenahi sebuah kota, entah itu dari segi perekonomian, maupun dari segi pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi kebijakan *smart city* Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pariwisata Kabupaten Purwakarta, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan *smart city* Kabupaten Purwakarta dalam memajukan pariwisata Kabupaten Purwakarta, dan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta. Fokus dari penelitian ini mengenai implementasi kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Tahapan analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung adanya pengimplementasian kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta yaitu adanya animo masyarakat Purwakarta, pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan pihak swasta yang tinggi terhadap IT serta adanya keinginan pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan pelayanan yang baik. Akan tetapi di tengah pengimplementasian yang berlangsung terdapat beberapa faktor penghambat atau kendala, yaitu kurang siapnya masyarakat Purwakarta dan pemerintah Purwakarta untuk menjadikan teknologi sebagai budaya atau kultur di dalam kehidupan sehari-hari, serta masih adanya pemikiran materialis dari masyarakat Kabupaten Purwakarta terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sehingga pengimplementasian kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta masih belum cukup optimal. Saran, perlu adanya kerjasama anatara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam sosialisasi pengimplementasian kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta ini.

ABSTRACT

Rahayu, Annisa M. 2019. *The Implementation of Purwakarta Smart City in Purwakarta Regency to Promote Purwakarta Regency Tourism.* Essay. Department of Politics and Citizenship, Faculty of Social Sciences, Semarang State University. Advisor Dr. Puji Lestari S.Pd., M.Sc. 208 Pages.

Keywords: *Policy Implementation, Smart City, Factors, Difficulties*

Tourism has become one of the largest foreign exchange derives in Indonesia in the current era of globalization, one of the districts in Indonesia that is developing heritage tourism is Purwakarta Regency. Purwakarta Regency is a regency in West Java Province, Indonesia. One way that is proposed thus many visitors who travel to Purwakarta is to implement the concept of smart city, smart city is a concept created in the current era of globalization. At present all aspects of life are affected by globalization, including procedures for improving a city, whether in terms of the economy, or in terms of development. The purpose of this study is to explain the implementation of smart city policy of the Government of Purwakarta Regency in improving tourism in Purwakarta Regency, to find out the factors that influence the implementation of smart city policy in Purwakarta Regency in advancing tourism in Purwakarta Regency, to review and to analyze the implementation of smart city policy in Purwakarta Regency. The focus of this research is on the implementation of smart city policy in Purwakarta Regency. This study uses descriptive qualitative methods, using data collection methods of interview, observation, and documentation techniques. Validity test on of the data using the triangulation method. Steps of data analysis are data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results showed that the supporting factors for the implementation of smart city policy in Purwakarta Regency are the interest of the people of Purwakarta, the government of Purwakarta Regency, and the private sector that has high interest for IT and the desire of the Purwakarta Regency government to improve good services. However, in the midst of ongoing implementation there are several inhibiting factors or difficulties, there are the unpreparedness of the Purwakarta community and the Purwakarta government to make technology as culture in daily life, as well as the existence of materialist thoughts from the people of Purwakarta Regency on the socialization carried out by Purwakarta Regency Government. Therefore, the implementation of smart city policy in Purwakarta Regency is still not optimal enough. Suggestions, there is a need for cooperation between the community and the Purwakarta Regency government in the socialization of the implementation of the smart city policy in Purwakarta Regency.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



116

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR SINGKATAN

Diskominfo: Dinas Komunikasi dan Informasi

Disporaparbud: Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR GAMBAR



96

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, namun hanya sekitar 2.342 pulau saja yang berpenghuni (Prasetya, 2017; Malau, 2013). Tidak hanya memiliki banyak pulau, Indonesia pun merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak keempat di dunia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2015). Salah satu pulau di Indonesia yang paling padat penduduknya adalah pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk sebanyak 160 juta jiwa atau sekitar 80% jumlah penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2015). Pulau Jawa terbagi menjadi 5 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang menempati urutan ke dua yang memiliki penduduk terbesar di Pulau Jawa. Hal tersebut dapat dilihat dengan jumlah penduduk yang mencapai 43 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2015). Provinsi Jawa Barat memiliki 18 kabupaten, salah satu kabupaten di Jawa Barat adalah Purwakarta. Kabupaten Purwakarta adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Purwakarta

terletak di Kecamatan Purwakarta dan berjarak kurang lebih 80 km sebelah tenggara Jakarta (Pemkab Purwakarta, 2017). Kabupaten Purwakarta berada pada titik-temu tiga koridor utama lalu-lintas yang sangat strategis, yaitu Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Karawang di bagian Utara dan sebagian wilayah Barat, Kabupaten Subang di bagian Timur dan sebagian wilayah bagian Utara, Kabupaten Bandung Barat di bagian Selatan, dan Kabupaten Cianjur di bagian Barat Daya.

Kabupaten Purwakarta terdiri atas 17 Kecamatan dengan 192 desa dan kelurahan yang memiliki luas wilayah masing-masing sebesar 971.72 km². Kecamatan di Kabupaten Purwakarta memiliki jarak yang berbeda-beda antar kecamatan, untuk jarak yang terdekat yaitu antara Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Plered yang berjarak 4 km, sedangkan untuk jarak yang terjauh yaitu antara Kecamatan Bojong dengan Kecamatan Sukasari yang berjarak 60 km (Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta, 2018). Jumlah penduduk yang menempati wilayah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2017 yaitu sebanyak 943,337 jiwa, yang terdiri dari 479,713 penduduk laki-laki dan 463,624 jiwa penduduk perempuan. Jumlah ini meningkat sebesar 1.14 % dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016.

Kabupaten Purwakarta dipimpin oleh seorang bupati beserta dengan seorang wakil. Bupati Purwakarta saat ini adalah Anne Ratna Mustika, yang baru dilantik pada bulan September 2018 menggantikan Bupati sebelumnya, yaitu H. Dedi Mulyadi, SH, serta wakil Bupati Purwakarta yang baru, yaitu

Aming, yang menggantikan Drs. Dadan Koswara (Pembekab Purwakarta, 2017; Perdana, 2018). Anne Ratna Mustika juga merupakan seorang bupati yang menerapkan nilai kebudayaan Sunda di dalam kebijakan-kebijakannya.

Pada saat kepemimpinan Dedi Mulyadi banyak peraturan daerah di Purwakarta yang mengandung unsur budaya Sunda, seperti misalnya saja seragam sekolah dan dinas diganti dengan kebaya (untuk perempuan) dan kampret beserta dengan iket (pakaian masyarakat Sunda untuk pria berwarna hitam-hitam). Tidak hanya itu saja, Dedi Mulyadi juga memasukan unsur-unsur kebudayaan Sunda di semua aspek kehidupan masyarakat Purwakarta. Salah satu aspek yang dimasukan unsur budaya Sunda yaitu aspek pariwisata Kabupaten Purwakarta (Pembekab Purwakarta, 2017). Walaupun pemimpin Kabupaten Purwakarta berganti, namun hingga saat ini Kabupaten Purwakarta masih gencar sekali untuk memajukan pariwisata alam dan pariwisata tradisional. Seperti curug (air terjun), sawah, desa pendidikan, dan lain sebagainya. Pariwisata yang diusung oleh Bupati Purwakarta, tidak hanya menawarkan alam saja, tetapi juga nilai-nilai kehidupan serta budaya asli orang Purwakarta yang besuku Sunda. Dari kebijakan yang diterapkan oleh Bupati Purwakarta dalam pariwisata Kabupaten Purwakarta, dapat dilihat bahwa kebijakan pariwisata yang diusung oleh Bupati Purwakarta termasuk ke dalam pariwisata pusaka.

Pariwisata telah menjadi salah satu penghasil devisa terbesar di Indonesia dalam era globalisasi saat ini (Soebagyo, 2012). Pariwisata menjadi penghasil devisa terbesar disebabkan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang

begitu banyak serta kaya akan nilai budaya, sejarah, dan adat istiadat. Ada berbagai jenis pariwisata yang dapat dikembangkan, namun yang paling mendukung dengan keadaan Indonesia saat ini adalah pariwisata pusaka.

Pariwisata pusaka dapat dengan mudah dikembangkan oleh kabupaten-kabupaten di Indonesia karena pariwisata pusaka langsung mengembangkan objek wisata lokal, sehingga masyarakat lokal sendiri yang mengelola pariwisata tersebut. Salah satu kabupaten di Indonesia yang mengembangkan pariwisata pusaka adalah Kabupaten Purwakarta yang terletak di Jawa Barat. Dalam kepemimpinan Dedi Mulyadi, kebijakan yang diambil berlandaskan unsur budaya serta nilai luhur suku sunda. Dedi Mulyadi dalam kebijakannya untuk mempromosikan objek wisata alam, sejarah, serta budaya Kabupaten Purwakarta. Acap kali memilih objek wisata yang kental dengan nilai luhur Kasundaan. Walau demikian, pariwisata pusaka yang diterapkan oleh Bupati Purwakarta tersebut belum memiliki banyak peminat. Hal ini disebabkan karena masih sedikit sekali informasi-informasi mengenai objek pariwisata di Kabupaten Purwakarta serta informasi mengenai fasilitas-fasilitas pariwisata di Kabupaten Purwakarta.

Salah satu cara yang ditawarkan agar banyak para pengunjung yang melakukan wisata ke Purwakarta adalah dengan menerapkan konsep *smart city* di dalam kebijakan Kabupaten Purwakarta. Konsep *smart city* di dalam kebijakan Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu bentuk teknologi dan budaya yang tercipta dari globalisasi yang paling dapat kita rasakan untuk saat ini. Globalisasi sendiri dapat terjadi karena adanya pertukaran baik dari segi

ekonomi, pembangunan, sosial, maupun budaya serta globalisasi juga dapat memengaruhi perekonomian suatu negara, terutama dalam bidang jual beli (The Levin Institute - The State University of New York, 2016).

Smart city memiliki beberapa definisi, salah satu dari definisi tersebut yaitu menurut Leonidas G. Anthopoulos. Menurut Leonidas G. Anthopoulos (2017:8), *smart city* merupakan sebuah pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi, serta inovasi oleh kota, sebagai sarana untuk mendukung pembangunan dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan untuk mengatasi beberapa tantangan yang berhubungan dengan enam dimensi, yaitu masyarakat, ekonomi, pemerintah, mobilitas, lingkungan, serta mata pencaharian. Oleh sebab itu lah konsep *smart city* pun diterapkan di dalam kebijakan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan pariwisata Kabupaten Purwakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan *smart city* Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memajukan pariwisata Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana dinamika yang terjadi di dalam pengimplementasian kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pariwisata Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan implementasi kebijakan *smart city* Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pariwisata Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui dinamika pengimplementasian kebijakan *smart city* Kabupaten Purwakarta dalam memajukan pariwisata Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang politik, khususnya mengenai kajian kebijakan publik, serta memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Secara Praktis

Penulis dapat mengetahui mengenai implementasi kebijakan *smart city* dalam meningkatkan pariwisata Kabupaten Purwakarta dan mengetahui

faktor apa saja yang memengaruhi implementasi kebijakan *smart city* Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak institusi pemerintah Indonesia dan daerah dalam mengembangkan *smart city* dan pariwisata

E. Batasan Istilah

Adapun pembatasan istilah terkait dengan judul penelitian adalah untuk mempersempit lingkup penelitian sehingga terhindar dari cakupan pembahasan yang terlampaui luas, pembatasan penelitian yang dimaksud di antaranya:

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan publik atau *public policy* seringkali disebut dengan kebijakan, merupakan produk ilmu politik, di lain pihak kebijakan publik sering diartikan berbeda-beda oleh para ahli. Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik (Handoyo, 2012). Kebijakan dalam arti umum menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas. Di dalam bahasa Inggris, kata *policy* sering kali diterjemahkan sebagai kebijakan, yaitu suatu keputusan pemerintah, karena pemerintah lah yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat serta bertanggungjawab untuk melayani kepentingan umum (Prawiraningrat, 2015). Kebijakan dalam penelitian ini untuk mengetahui bentuk kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta

2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Ripley dan Franklin (1982 dalam Winarno, 2016) yang melihat bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah fenomena atau kejadian yang di dalamnya merujuk pada sejumlah kegiatan atau program yang diinginkan oleh pejabat pemerintah, mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, terutama birokrat, serta merupakan fenomena yang terjadi setelah diterapkannya sebuah undang-undang, memiliki keuntungan atau *benefit* serta memiliki jenis luaran yang nyata atau *tangible output*. Di dalam pandangan ini terdapat tiga kegiatan utama dalam implementasi kebijakan publik, yaitu pertama mencari dan mendapatkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan agar implementasi dapat berjalan dengan lancar, kegiatan yang kedua yaitu membuat arahan-arahan, regulasi merencanakan dan mendesain program, dan yang ketiga yaitu mengorganisasikan kegiatan-kegiatan pengimplementasian dengan cara menciptakan unit-unit kerja dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Pandangan yang kedua mengenai implementasi kebijakan publik yaitu menurut Grindle (1980 dalam Winarno, 2016). Menurut pandangan Grindle implementasi kebijakan merupakan kaitan, yang secara umum ada, untuk memudahkan tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah, sehingga tugas dari implementasi yaitu terbentuknya suatu sistem sarana kebijakan, yaitu sistem yang mengantarkan atau mengaitkan dan menjalankan satu sarana

dengan sarana yang lain sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat tercapai. Penelitian ini meneliti implementasi kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta.

3. *Smart City* dalam Kebijakan Publik

Smart City yaitu sebuah tujuan pembangunan kota untuk mengintegrasikan beberapa teknologi informasi dan komunikasi dan solusi internet dengan cara yang aman untuk mengelola sistem informasi, sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan pasokan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum, dan layanan masyarakat lainnya (Musa, 2017). Tujuan membangun kota yang cerdas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan informatika dan teknologi kota untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan memenuhi kebutuhan warga.

Teknologi memungkinkan pejabat kota untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota dan untuk memantau apa yang terjadi di kota, bagaimana kota ini berkembang, dan bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik (New York City Mayor's Office of Technology and Innovation, 2017; Musa, 2017). Melalui penggunaan sensor yang terintegrasi dengan sistem pemantauan *real-time* atau secara langsung, data dikumpulkan dari warga negara dan perangkat - kemudian diproses dan dianalisis. Informasi dan pengetahuan yang dikumpulkan adalah kunci untuk mengatasi inefisiensi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

Beberapa konsep dan teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah elemen kebijakan, partisipasi publik, pemberdayaan masyarakat, globalisasi, *smart city*, dan pariwisata, serta tiga teori utama yang digunakan yaitu kebijakan publik, terutama implementasi kebijakan publik, partisipasi publik terutama pemberdayaan masyarakat, serta teori *smart city*.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau *public policy* seringkali disebut dengan kebijakan, merupakan produk ilmu politik, di lain pihak kebijakan publik sering diartikan berbeda-beda oleh para ahli. Kebijakan memiliki arti umum dan spesifik (Handoyo, 2012). Kebijakan dalam arti umum menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas.

Di dalam bahasa Inggris, kata *policy* sering kali diterjemahkan sebagai kebijakan, yaitu suatu keputusan pemerintah, karena pemerintah lah yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat serta bertanggungjawab untuk melayani kepentingan umum (Prawiraningrat, 2015). Definisi kedua dari kebijakan yaitu kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

(Abidin, 2002). Definisi kebijakan publik yang ke tiga yaitu kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh seseorang maupun sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu atau kepentingan-kepentingan tertentu di dalam masyarakat (Taufiqurakhman, 2014).

Definisi yang kebijakan publik yang ke empat yaitu kebijakan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh pemerintah maupun aktor-aktor yang terlibat, sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Definisi kebijakan publik yang ke lima yaitu kebijakan sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari sekadar keputusan spesifik. Arti spesifik dari kebijakan berkaitan dengan cara atau alat (*means*) dan tujuan (*ends*), dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Handoyo, 2012).

Sehingga, dari beberapa definisi mengenai kebijakan publik maka dapat ditarik sebuah simpulan bahwa kebijakan publik yaitu sebuah rangkaian keputusan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan di dalam masyarakat untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu yang memiliki tujuan untuk mengarahkan masyarakat, bertanggungjawab untuk melayani kepentingan umum, serta memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dicapai di dalam masyarakat.

Kebijakan publik memiliki strata, mulai dari kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis. Kebijakan umum dipahami pula sebagai kebijakan makro, kebijakan pelaksanaan (Handoyo, 2012). Untuk merumuskan sebuah kebijakan, pemerintah harus melakukan beberapa cara, yaitu: menentukan masalah, lalu merumuskan masalah tersebut menjadi suatu kebijakan, lalu menganalisis kebijakan, mengimplementasikan kebijakan tersebut, memantau hasil dari kebijakan tersebut, mengevaluasi kebijakan yang dibuat, dan mengeluarkan naskah kebijakan. Suatu masalah disebut sebagai masalah publik dapat dilihat dari akibat tindakan yang dilakukan oleh individu.

a. Masalah Publik, Masalah Kebijakan, dan Isu Publik

Untuk merumuskan sebuah kebijakan publik terlebih dahulu pembuat kebijakan harus menganalisis mengenai masalah yang terjadi di dalam masyarakat, atau masalah publik. Masalah publik memiliki dua konsekuensi, konsekuensi yang pertama yaitu masalah yang memiliki dampak secara langsung terhadap satu orang saja, dan konsekuensi yang kedua yaitu masalah yang terjadi secara langsung terhadap banyak orang (Winarno, 2016)

Menurut Theodore J. Lowi (1964 dalam Winarno, 2016) masalah publik dapat dikategorikan dalam beberapa kategori, yaitu kategori masalah prosedural dan masalah substantif. Masalah prosedural berkenaan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana menjalankan tugas-

tugasnya; sedangkan masalah substantif berkaitan dengan akibat-akibat nyata dari kegiatan manusia, seperti kebebasan berbicara, keadilan sosial, dan lain-lain (Handoyo, 2012; Winarno, 2016). Menurut Winarno (2007 dalam Handoyo, 2012) masalah publik juga dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu masalah distributif, masalah regulasi, dan masalah redistributif.

- 1) Masalah distributif mencakupi sejumlah kecil orang yang dapat ditangani satu per satu.
- 2) Masalah regulasi mendorong timbulnya tuntutan yang diajukan dalam rangka membatasi tindakan pihak lain. Masalah regulasi ini berkaitan dengan peraturan yang bertujuan untuk membatasi tindakan pihak tertentu.
- 3) Masalah redistributif menyangkut masalah yang menghendaki perubahan sumber-sumber untuk kelompok atau kelas dalam masyarakat.

Menurut Charles O. Jones (1975 dalam Winarno, 2016) mengategorikan masalah publik menjadi dua, yaitu yang pertama masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat perkotaan yang tertata dan memiliki tujuan untuk melakukan suatu tindakan. Sedangkan yang kedua yaitu masalah-masalah individual atau pribadi yang tidak dapat dipecahkan oleh individu atau pribadi tersebut sehingga masalah tersebut menyebar luas dan menjadi masalah publik, sehingga masalah tersebut menjadi masalah publik yang tidak tertata dan kurang mendapat dukungan dari masyarakat.

Sehingga dari beberapa kategori masalah publik di atas, dapat dilihat bahwa masalah publik memiliki beberapa ciri, seperti yang dikemukakan oleh William Dunn (1995 dalam Winarno, 2016), ciri yang pertama yaitu saling ketergantungan. Masalah publik akan selalu berkaitan dan memengaruhi suatu bidang dengan bidang lainnya sehingga masalah tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Ciri yang kedua yaitu subjektivitas. Suatu masalah publik dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang dapat didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Ciri yang ketiga yaitu masalah publik memiliki sifat buatan, yaitu masalah publik merupakan hasil penilaian subjektif manusia karena manusia yang menilai suatu perubahan terkait dengan situasi mereka, serta masalah publik juga dapat diterima sebagai definisi yang sah dari kondisi sosial. Ciri yang terakhir mengenai masalah publik yaitu masalah publik bersifat dinamis, sehingga memiliki banyak solusi yang ditawarkan untuk memecahkan suatu masalah tersebut.

Masalah publik selanjutnya dapat bertransformasi menjadi masalah kebijakan (Handoyo, 2012). Ada tiga indikator, agar masalah publik dapat menjadi masalah kebijakan (Handoyo, 2012).

- 1) Ruang lingkup dan kemungkinan dukungan terhadap masalah publik (isu) tersebut dapat dikumpulkan.
- 2) *Problem* atau isu dinilai penting.
- 3) Ada kemungkinan masalah publik tersebut dapat dipecahkan.

Selanjutnya, masalah publik tersebut berkembang menjadi isu kebijakan. Isu kebijakan sendiri yaitu hasil dari perdebatan mengenai suatu masalah terkait dengan definisi, eksplanasi, dan evaluasi masalah tersebut (Winarno, 2016). Masalah-masalah yang berkembang menjadi isu-isu kebijakan yang berada di dalam masyarakat kemudian diperjuangkan oleh masyarakat agar mendapatkan perhatian dari para *elite* politik dan menjadi bagian dari agenda kebijakan. Agenda kebijakan sendiri dapat didefinisikan sebagai tuntutan-tuntutan, yang merupakan isu-isu publik, agar para pemangku kekuasaan atau pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk membuat atau tidak membuat kebijakan tertentu yang berasal dari isu publik. Tuntutan-tuntutan tersebut dibagi berdasarkan tingkat prioritas.

Menurut Lester dan Stewart (2000 dalam Winarno, 2016) suatu isu publik akan mendapat perhatian apabila, 1) Isu tersebut tidak dapat didiamkan terlalu lama dan bersifat mengancam negara dan masyarakat dimasa depan; 2) Isu tersebut memiliki sifat partikularitas, yaitu isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang lebih besar; 3) Isu tersebut memiliki aspek emosional dan mendapat perhatian media massa; 4) Isu tersebut mendorong adanya pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kekuasaan, legitimasi, dan masyarakat; serta 5) Isu tersebut sedang menjadi bahan perbincangan di dalam masyarakat.

b. Agenda Publik

Agenda publik secara tidak langsung terbagi ke dalam dua macam agenda, yaitu agenda sistemik dan agenda pemerintah menurut Roger W. Cobb dan Charles D. Elder (1972 dalam Winarno, 2016). Agenda sistemik yaitu kumpulan dari seluruh masalah atau isu yang menurut masyarakat pantas untuk mendapat perhatian dari masyarakat yang lebih luas dan mencakup masalah yang berada dalam yurisdiksi wewenang pemerintah secara sah. Agenda sistemik selalu terdapat dalam setiap sistem politik, baik nasional maupun daerah. Tindakan mengenai suatu masalah, dalam hal ini berbentuk kebijakan, hanya akan ada bila masalah tersebut diajukan kepada lembaga pemerintah yang berwenang untuk mengambil tindakan yang pas.

Sedangkan agenda yang kedua yaitu agenda lembaga atau pemerintah (Winarno, 2016). Agenda pemerintah atau lembaga yaitu kumpulan dari seluruh masalah yang benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah. Agenda lembaga, di sisi lain, juga merupakan agenda yang bersifat khusus, dan lebih konkret apabila dibandingkan dengan agenda sistemik, hal ini disebabkan karena secara tidak langsung agenda lembaga menampung bermacam-macam pokok agenda yang membutuhkan keputusan-keputusan kebijakan. Pokok-pokok agenda lembaga dibedakan menjadi dua, yaitu pokok-pokok agenda lama dan pokok-pokok agenda baru. Pokok-pokok agenda baru timbul dari kejadian-kejadian tertentu, sehingga pokok-pokok agenda baru selalu tercantum secara teratur pada agenda kebijakan. Sedangkan pokok-pokok agenda lama merupakan pokok-pokok agenda yang kurang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan. Hal

ini disebabkan karena: (a) Masalah-masalah publik telah tercantum lama sehingga para pembuat kebijakan menanggapi bahwa masalah-masalah tersebut telah mendapat cukup perhatian; (b) Para pembuat kebijakan telah memahami masalah-masalah tersebut; (c) Alokasi waktu yang diberikan untuk membahas masalah tersebut kurang; serta (d) Dalam membahas masalah-masalah tersebut selalu sarat dengan masalah.

c. Merumuskan Kebijakan Publik

Setelah membuat agenda kebijakan, maka tahap selanjutnya yaitu merumuskan kebijakan. Perumusan kebijakan dengan pembentukan kebijakan merupakan dua hal yang berbeda, hal ini karena pembentukan kebijakan melibatkan percabangan yang luas, pembentukan kebijakan melibatkan perpektif jangka panjang, pembentukan kebijakan menggunakan sumber-sumber kritis agar dapat diterima di dalam masyarakat, pembentukan kebijakan merupakan proses intelektual, serta pembentukan kebijakan sebagai kelanjutan proses sosial yang dinamis (Winarno, 2016). Sedangkan perumusan kebijakan, menurut Anderson (1969 dalam Winarno, 2016), merupakan upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi.

Di dalam perumusan kebijakan publik tidak lah terlepas dari peran aktor yang memengaruhi dan berperan dalam perumusan kebijakan publik tersebut. Para aktor yang memengaruhi dan berperan dalam perumusan

kebijakan publik terbagi menjadi dua, yaitu aktor formal dan aktor non-formal (Winarno, 2016). Para aktor formal terdiri dari agen-agen pemerintah atau birokrasi, presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif. Sedangkan para aktor non-formal terdiri atas kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu. Selain aktor yang memengaruhi dan berperan dalam perumusan kebijakan, terdapat nilai-nilai yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan, hal ini sesuai dengan James Anderson (1969 dalam Winarno, 2016) yang membagi empat nilai yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan, keempat nilai tersebut, yaitu nilai politik, nilai organisasi, nilai pribadi, nilai kebijakan, serta nilai ideologi.

Pada tahap merumuskan kebijakan publik diperlukan penjelasan agar dapat memahami perumusan kebijakan dan analisis kebijakan (Winarno, 2016). Menurut Eko Handoyo dkk (2015) terdapat 14 model yang dapat digunakan dalam memahami perumusan kebijakan, yaitu model kelembagaan, model corong, model proses, model kelompok, model elit, model rasional, model inkrementalis, model permainan, model pilihan publik, model sistem, model pengamatan, model demokratis, model strategis, dan model deliberatif. Sedangkan menurut Winarno (2016) dalam memahami perumusan kebijakan terdapat enam model yang dapat digunakan, yaitu model sistem, model rasional komprehensif, model kepuasan, model penambahan, model pengamatan campuran, dan model kualitatif optimal.

Pada pembuatan kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta menggunakan tipe model demokrasi. Model demokratis yaitu model yang memiliki peran dalam mengajak dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* dalam pengambilan keputusan, sehingga kepentingan masyarakat dan *stakeholder* dapat terakomodasi, dan sasaran kebijakan menjadi lebih tepat.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Tahap terakhir di dalam kebijakan publik yaitu implementasi dari sebuah kebijakan publik, sehingga tahap ini seringkali dilihat sebagai tahapan yang paling penting, hal ini disebabkan karena agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan atau kepentingan yang diinginkan (Winarno, 2016). Di sisi lain, implementasi kebijakan pun memiliki beberapa pandangan menurut para ahli. Pandangan yang pertama yaitu menurut Lester dan Steward (2000, dalam Winarno, 2016) yang melihat bahwa implementasi kebijakan publik merupakan fenomena yang kompleks, yang di dalam fenomena tersebut merupakan sebuah pelaksanaan undang-undang yang melibatkan seluruh aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja untuk menjalankan sebuah kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut, sehingga secara tidak langsung merupakan sebuah proses yang memiliki luaran atau *output* dan memiliki dampak atau *outcome*.

Pandangan selanjutnya yaitu dari Ripley dan Franklin (1982 dalam Winarno, 2016) yang melihat bahwa implementasi kebijakan publik merupakan sebuah fenomena atau kejadian yang di dalamnya merujuk pada sejumlah kegiatan atau program yang diinginkan oleh pejabat pemerintah, mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, terutama birokrat, serta merupakan fenomena yang terjadi setelah diterapkannya sebuah undang-undang, memiliki keuntungan atau *benefit* serta memiliki jenis luaran yang nyata atau *tangible output*. Di dalam pandangan ini terdapat tiga kegiatan utama dalam implementasi kebijakan publik, yaitu pertama mencari dan mendapatkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan agar implementasi dapat berjalan dengan lancar, kegiatan yang kedua yaitu membuat arahan-arahan, regulasi merencanakan dan mendesain program, dan yang ketiga yaitu mengorganisasikan kegiatan-kegiatan pengimplementasian dengan cara menciptakan unit-unit kerja dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.

Pandangan yang ketiga mengenai implementasi kebijakan publik yaitu menurut Grindle (1980 dalam Winarno, 2016). Menurut pandangan Grindle implementasi kebijakan merupakan kaitan, yang secara umum ada, untuk memudahkan tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah, sehingga tugas dari implementasi yaitu terbentuknya suatu sistem sarana kebijakan, yaitu sistem yang mengantarkan atau mengaitkan dan menjalankan satu sarana dengan sarana yang lain sehingga tujuan yang dimaksudkan dapat tercapai.

Pandangan implementasi kebijakan yang terakhir yaitu menurut Van Meter dan Van Horn (1975 dalam Winarno 2016) melihat implementasi kebijakan yaitu sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pemerintah, maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut mencakup usaha untuk mengubah keputusan atau kebijakan yang ada menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu, sehingga tahap implementasi kebijakan hanya terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan sumber daya telah siap untuk mendukung suatu implementasi kebijakan. Dari ke-empat pandangan tersebut dapat kita lihat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang penting untuk dilakukan, apabila undang-undang dan suatu kebijakan telah ditetapkan, yang memiliki maksud untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, baik oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta, dengan didukung oleh sumber daya-sumber daya yang sudah terkumpul.

Di dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga implementor atau pelaksana kebijakan publik, yaitu pertama birokrasi. Birokrasi secara umum merupakan badan yang memiliki kebebasan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, birokrasi pun secara langsung diberi tanggung jawab oleh undang-undang untuk mengimplementasikan, mengatur, dan mengawasi sebuah kebijakan (Winarno, 2016). Di dalam bagian ini terbagi ke dalam tiga badan, yaitu badan eksekutif, badan legislatif, serta badan yudikatif. Implementor yang kedua yaitu kelompok-

kelompok penekan, kelompok penekan dapat menjadi bagian dari implementor apabila bisa memengaruhi birokrasi atau badan administrasi di daerah. Implementor yang ketiga yaitu organisasi masyarakat, organisasi masyarakat sering kali terlibat dalam pengimplementasian program-program publik.

3. Partisipasi Publik dalam Implementasi Kebijakan Publik

Indonesia seperti yang sudah diketahui merupakan negara demokrasi serta merupakan negara yang menerapkan sistem otonomi daerah. Salah satu bentuk dari demokrasi dan otonomi daerah yaitu adanya partisipasi publik. Partisipasi memiliki beberapa pengertian, yaitu pertama partisipasi yang selama ini sering diartikan secara umum sebagai keikutsertaan seseorang dalam suatu agenda, sedangkan dalam sisi politik, partisipasi sering dilihat sebagai keikutsertaan dalam kapasitasnya sebagai warga negara (Rahim, 2017). Makna dari partisipasi dilihat dari sisi politik tidak hanya dalam menerima maupun menolak rancangan kebijakan pemerintah, tetapi juga mengusulkan suatu kebijakan. Sehingga partisipasi merupakan hak warga negara yang sudah terjamin di dalam ketentuan perundang-undangan, namun di sisi lain, partisipasi harus dituntut agar partisipasi dapat dijalankan.

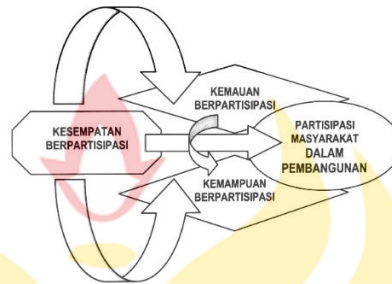
Pengertian partisipasi yang kedua yaitu menurut Bomby (1974 dalam Mardikanto & Soebiato, 2017) yang melihat partisipasi sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang

bermanfaat. Sedangkan menurut Verhangen (1979 dalam Mardikanto & Soebiato, 2017) melihat bahwa partisipasi merupakan sebuah kegiatan yang berasal dari interaksi dan komunikasi yang khusus dan memiliki kaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta memiliki manfaat. Interaksi dan komunikasi yang menjadi partisipasi tersebut tumbuh karena adanya kesadaran akan kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki, kondisi yang tidak memuaskan tersebut kemudian dapat diperbaiki melalui kegiatan masyarakat, masyarakat memiliki kemampuan dan memiliki rasa kepercayaan diri untuk berpartisipasi dan memberikan sumbangan bagi kegiatan tersebut.

Sehingga dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa partisipasi merupakan suatu keterlibatan yang secara aktif dan sukarela yang memiliki berbagai macam alasan baik alasan yang berasal dari dalam diri atau intrinsik maupun alasan yang berasal dari luar atau ekstrinsik, di dalam berbagai macam proses kegiatan, seperti pengambilan keputusan pengawasan, evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai (Mardikanto & Soebiato, 2017).

Kemudian dalam mencapai partisipasi publik di dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, masyarakat terlebih dahulu harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Slamet (1985 dalam Mardikanto & Soebiato, 2017), masyarakat haruslah memenuhi tiga syarat dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, yaitu 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi; 2) Adanya kemauan

masyarakat untuk berpartisipasi; 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.1 Syarat Tumbuh dan Berkembangnya Partisipasi Masyarakat

Sumber: Slamet (1985 dalam Mardikanto & Soebiato, 2017)

Kemudian partisipasi publik di dalam politik yang demokratis, terutama pada saat berpartisipasi di dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, harus selalu melibatkan interaksi antara individu atau organisasi politik dengan negara yang dilakukan dengan tindakan terorganisir melalui pemungutan suara, kampanye, protes, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk memengaruhi wakil-wakil pemerintah (Rahim, 2017). Hal ini disebabkan karena apabila tidak terdapat interaksi ketika berpartisipasi di dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, maka partisipasi publik tidak dapat dilakukan.

Kemudian, menurut Thomas (1995 dalam Masango, 2001) pemerintah di dalam memfasilitasi proses partisipasi publik di dalam sebuah kebijakan haruslah menggunakan kebijakan pemerintah, hal ini disebabkan

karena para pembuat kebijakan tidak dapat mengantisipasi dan mengakomodasi seluruh kebutuhan dalam proses pengimplementasian sebuah kebijakan. Di lain pihak, partisipasi publik di dalam pengimplementasian sebuah kebijakan penting untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena dengan adanya partisipasi publik, program-program pemerintah terutama di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan sebuah pemerintahan yang baik, dapat terlaksana dengan baik. Sehingga dengan kata lain, partisipasi publik dalam pengimplementasian suatu kebijakan dapat dilakukan dengan membangun dukungan dan menghilangkan gesekan-gesekan yang ada.

4. Globalisasi dalam Memengaruhi *Smart City*

Globalisasi digambarkan sebagai sebuah peningkatan pertukaran barang, jasa, masyarakat, informasi, ide, budaya, sistem politik, pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, ide-ide, dan lain sebagainya yang intensif, sehingga hal tersebut menyebabkan integrasi lintas batas antar negara dalam bidang perekonomian, aktivitas sosial budaya, dan lain sebagainya (Bertucci & Alberti, 2001; The Levin Institute - The State University of New York, 2016). Jika kita lihat lebih jauh lagi, globalisasi sudah terjadi beratus tahun yang lalu, namun pada saat itu globalisasi yang terjadi tidak lah memiliki dampak yang luar biasa seperti sekarang ini.

Globalisasi dapat terjadi karena adanya pertukaran baik dari segi ekonomi, pembangunan, sosial, maupun budaya serta globalisasi juga dapat

memengaruhi perekonomian suatu negara, terutama dalam bidang jual beli. Salah satu bentuk dari globalisasi yang paling dapat kita rasakan untuk saat ini adalah banyak teknologi serta budaya yang masuk ke negara Indonesia dengan mudah dan cepat. Salah satu cara agar budaya dan teknologi tersebut dapat masuk ke suatu negara adalah dengan adanya kebijakan *smart city* dan pariwisata. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, pariwisata merupakan sebuah sektor industri yang paling besar di antara sektor industri yang lain karena dapat memberikan devisa yang cukup besar serta menjadi penyokong perekonomian sebuah negara tanpa harus meminjam modal maupun membeli peralatan industri (Soebagyo, 2012). Sedangkan *smart city* dianggap sebagai cara untuk mengatur sebuah kota atau wilayah dengan efisien.

5. Smart City dalam Kebijakan Publik

Globalisasi seperti sekarang ini banyak sekali wilayah-wilayah di dunia berbondong-bondong menerapkan kebijakan *smart city* di wilayah mereka, namun sebenarnya *smart city* telah ada sejak akhir tahun 1990 (Harrison & Donnelly, 2011). *Smart city* pada saat itu digunakan sebagai kebijakan baru untuk penataan wilayah perkotaan. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan teknologi mengembangkan konsep *smart city*, sehingga konsep *smart city* tidak hanya sebagai sebuah kebijakan saja, tetapi juga telah berkembang menjadi sebuah sistem aplikasi yang rumit dan dapat meningkatkan pelayanan sebuah daerah, mengintegrasikan pengoperasian

infrastruktur serta layanan perkotaan, seperti transportasi, distribusi air dan listrik, serta keamanan dan keselamatan umum.

Sehingga secara tidak langsung, pemamaparan di atas memberikan sebuah definisi terkait dengan *smart city*. *Smart City* yaitu sebuah tujuan pembangunan kota untuk meningkatkan pelayanan public suatu daerah, serta untuk mengintegrasikan beberapa teknologi informasi dan komunikasi dan solusi internet dengan cara yang aman untuk mengelola sistem informasi, sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan pasokan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum, dan layanan masyarakat lainnya (Musa, 2017). Tujuan membangun kota yang cerdas atau *smart city* adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menggunakan informatika dan teknologi kota untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan memenuhi kebutuhan warga.

Teknologi yang diterapkan menjadi *smart city* memungkinkan pejabat kota untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota, dan untuk memantau apa yang terjadi di kota, bagaimana kota ini berkembang, dan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik (New York City Mayor's Office of Technology and Innovation, 2017; Musa, 2017). *Smart city* ini digunakan untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan interaktivitas layanan perkotaan, untuk mengurangi biaya dan konsumsi sumber daya dan untuk meningkatkan kontak antara masyarakat dan pemerintah.

B. Kajian Hasil Penelitian Yang Relevan

Dalam melaksanakan penelitian mengenai analisis peran kebijakan *smart city* dan peran partisipasi masyarakat Purwakarta dalam memajukan pariwisata pusaka kabupaten Purwakarta, peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil lima hasil penelitian terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Purnomowati dan Ismini yang berjudul *Konsep Smart City dan Pengembangan Pariwisata Di Kota Malang* dengan pertanyaan penelitian, yaitu “*Bagaimana implementasi konsep smart city di Kota Malang?*” dan “*Bagaimana pengembangan pariwisata di Kota Malang?*”. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Kota Malang sebagai *smart city* serta untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pariwisata di Kota Malang. Penelitian tersebut bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi apabila kebijakan *smart city* diterapkan di Kota Malang untuk mengembangkan pariwisata kota tersebut. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu berupa pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan observasi. Persamaan pada penelitian tersebut dengan penulis adalah pada kebijakan yang diimplementasikan, yaitu *smart city* dan lokasi yang menjadi objek atau *site* penelitian merupakan kota yang akhir-akhir ini menjadi tempat pariwisata yang paling sering dikunjungi. Adapun perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Penulis menggunakan dua teori, yaitu teori *smart city* serta

teori kebijakan publik. Selain itu juga, penulis membahas mengenai pariwisata pusaka di dalam penelitian penulis.

Kedua, penelitian karya Siti Widharetno Mursalim berjudul *Implementasi Kebijakan Smart City Di Kota Bandung* dengan mengangkat permasalahan komunikasi, yaitu sosialisasi yang dilakukan Pemerintah kota Bandung belum merata di setiap wilayah daerah serta kebijakan tersebut belum seluruhnya diterapkan oleh kabupaten maupun kota, permasalahan yang kedua yaitu sumber daya, yaitu penempatan pegawai di Pemerintahan belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, permasalahan yang ketiga yaitu disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, dan permasalahan terakhir yaitu struktur Birokrasi, belum semuanya memahami kebijakan yang dibuat, sehingga Pemerintah Kota Bandung mengadakan diklat khusus untuk mendalami program *Smart City* tersebut bagi para pegawai khususnya pegawai yang berada di dinas komunikasi dan Informatika karena dinas ini sebagai implementor. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dari data kuantitatif dengan mengumpulkan, memeriksa kembali dan mencari konsistensi jawaban dan analisa dengan mendeskripsikan data-data dalam tabel kemudian dibandingkan dengan kajian teori yang digunakan, melakukan wawancara, serta dengan metode triangulasi data. Sedangkan untuk teori yang digunakan yaitu teori *smart city* dan teori kebijakan publik.

Tujuan utama dari penelitian Siti Widharetno Mursalim adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Kota Bandung sebagai *smart city* yang baik serta untuk

memberikan ulasan terkait dengan penerapan *smart city* di Kota Bandung. Penelitian dari Siti Widharetno Mursalim ini mengungkapkan bahwa penerapan *smart city* di Kota Bandung belum sepenuhnya berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, seperti implementasi kebijakan *smart city* di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung belum tersosialisasi secara merata dan dikomunikasikan dengan baik terutama kepada SKPD atau dinas-dinas lainnya sehingga banyak masyarakat kota Bandung itu sendiri yang belum mengetahui tentang *smart city*.

Persamaan penelitian Siti Widharetno Mursalim dengan penulisan yakni dalam hal teori yang digunakan, yaitu teori *smart city* dan teori kebijakan publik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah terletak pada lokasi yang menjadi objek atau *site* penelitian, penelitian Siti Widharetno Mursalim dilakukan di Kota Bandung yang merupakan kota metropolitan, dan telah lama menerapkan konsep *smart city*.

Ketiga, penelitian karya Ni Putu Nurwita Pratami Wijaya yang berjudul *Analyze of Smart City Concept as Supporting the Government Information Disclosure*. Penelitian ini menggambarkan bahwa konsep *smart city* memiliki banyak dimensi, salah satu dimensi yang terdapat di dalam *smart city* yaitu *smart government*. Peneliti di dalam tulisan ini ingin menunjukkan bahwa *smart government*, yang merupakan salah satu dimensi di dalam *smart city*, dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan transparansi atau keterbukaan informasi suatu pemerintahan. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan diskusi secara mendalam berdasarkan literatur yang ada.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu keuntungan yang didapat dalam pengimplementasian kebijakan *smart city* dalam menciptakan *smart government*, lebih fokus lagi dalam transparansi informasi terhadap publik, sedangkan subjek penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu keuntungan dari pengimplementasian kebijakan *smart city* dalam menciptakan *smart government* yang berfokus dalam memajukan pariwisata.

Ke-empat, penelitian karya Nur Faidati dan Muhammad Khozin yang berjudul *Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart city) Studi Kasus Kota Yogyakarta*. Penelitian tersebut melihat mengenai analisis strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengembangkan kota menjadi kota pintar (*smart city*) setelah Kota Yogyakarta masuk ke dalam 10 Destinasi Terbaik menurut *Traveller's Choice Award 2017*. Pada penelitian ini pengembangan *smart city* di Kota Yogyakarta telah dilakukan jauh sebelum adanya himbauan untuk mengimplementasikan kebijakan *smartcity*. Di dalam penelitian ini menyebutkan bahwa konsep *smart city* yang ada telah dibangun sejak awal tahun 2000 yang ditandai dengan adanya UPIK atau Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan. UPIK ini terdiri atas layanan SIM Pelayanan Kesehatan, Layanan YES 118, Konsultasi Belajar Siswa Online, Digital Library, Sistem Penerimaan Siswa Baru, Taman Pintar Yogyakarta, Hi Jogja, Whistle Blower System, SIM POS PBB, SIM MAPATDA, SIM Pasar, Sim Retribusi Pasar, dan aplikasi lainnya. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian

deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara.

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu strategi dari pengembangan *smart city* di kota Yogyakarta, lebih fokus lagi dalam pengembangan *smart city* yang sudah ada sebelumnya kemudian dikembangkan lebih jauh lagi, sedangkan subjek penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu keuntungan dari pengimplementasian kebijakan *smart city* dalam menciptakan *smart government* yang berfokus dalam memajukan pariwisata.

Ke-lima, penelitian karya Guntur Indrayana yang berjudul *Good Governance dan Kebijakan Publik (Studi atas Penerapan Jakarta Smart City Melalui Aplikasi Qlue)*. Penelitian tersebut mengangkat sebuah topik mengenai pengimplementasian *smart city* di Jakarta untuk menciptakan *good governance* melalui sebuah aplikasi yang dinamakan dengan *Qlue*. Penelitian ini melihat bahwa pengimplementasian kebijakan *smart city* telah berjalan dengan baik, terutama melalui aplikasi *Qlue*. Peneliti di dalam penelitian tersebut menilai bahwa dengan adanya aplikasi *Qlue* sebagai bentuk implementasi kebijakan *smart city* pemerintah DKI Jakarta semakin responsive terhadap permasalahan warga DKI Jakarta serta masyarakat pun menjadi lebih partisipatif terhadap kinerja pemerintah

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu tercapainya *good governance* melalui pengimplementasian *smart city*, lebih fokus lagi melalui sebuah aplikasi bernama *Qlue*, sedangkan subjek penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu keuntungan dari pengimplementasian kebijakan *smart city* dalam menciptakan *smart government* yang berfokus dalam memajukan pariwisata.

Dari setiap penelitian memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian Wiwin Purnomowati dan Ismini yang menjelaskan penerapan konsep *smart city* di Kota Malang untuk mengembangkan pariwisata Kota Malang dengan menggunakan teori *smart city* serta dengan sedikit teori kebijakan publik. Penelitian tersebut juga menjabarkan bahwa Kota Malang belum siap untuk menerapkan konsep *smart city* dikarenakan perangkat pemerintah Kota Malang beserta masyarakat lokal Kota Malang belum paham mengenai konsep *smart city*.
2. Penelitian Siti Widharetno Mursalim yang menjelaskan mengenai implementasi *smart city* di Kota Bandung. Penelitian ini berbeda dengan penelitian pertama yang hanya masih berupa konsep saja, penelitian ini mengulas keadaan Bandung setelah adanya penerapan *smart city*, mengulas kekurangan-kekurangan dari pemerintah kota Bandung terhadap penerapan *smart city*, serta mengkritisasi kebijakan *smart city* yang diterapkan di Kota Bandung.

3. Penelitian Ni Putu Nurwita Pratami Wijaya yang menjelaskan mengenai kebijakan *smart city* sebagai pendukung keterbukaan informasi pemerintah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian kedua yang mengulas mengenai keadaan Bandung setelah adanya penerapan *smart city*, mengulas kekurangan-kekurangan dari pemerintah kota Bandung terhadap penerapan *smart city*.
4. Penelitian Nur Faidati dan Muhammad Khozin yang menjelaskan mengenai pengimplementasian *smart city* di kota Yogyakarta yang sudah ada jauh sebelum kebijakan *smart city* ini dihimbau seperti saat ini, kebijakan *smart city* yang diimplementasikan di kota Yogyakarta pun mengarah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kota Yogyakarta. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas beberapa dimensi, termasuk dimensi *smart city* untuk menciptakan *smart government*.
5. Penelitian Guntur Indrayana yang menjelaskan mengenai pengimplementasian kebijakna *smart city* di DKI Jakarta untuk menciptakan *good governance* melalui aplikasi *Qlue*. Penelitian ini berbeda dengan penelitain sebelumnya. Penelitian ini menekankan pada efektivitas aplikasi *Qlue* dalam menciptakan *good governance*—seperti pemerintah DKI Jakarta yang lebih responsif terhadap keluhan masyarakat serta masyarakat DKI Jakarta yang lebih partisipatif—yang juga merupakan salah satu bentuk dari implementasi kebijakan *smart city* di DKI Jakarta.

Dari kelima penelitian tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan *smart city* hanya digunakan sebagai pendukung pemerintah saja dalam mengakses

pelayanan publik dan keterbukaan publik, akan tetapi dalam meningkatkan pariwisata masih belum digunakan, sehingga pada penelitian yang ditulis ini akan membahas implementasi kebijakan *smart city* untuk meningkatkan pariwisata.

C. Kerangka Berpikir

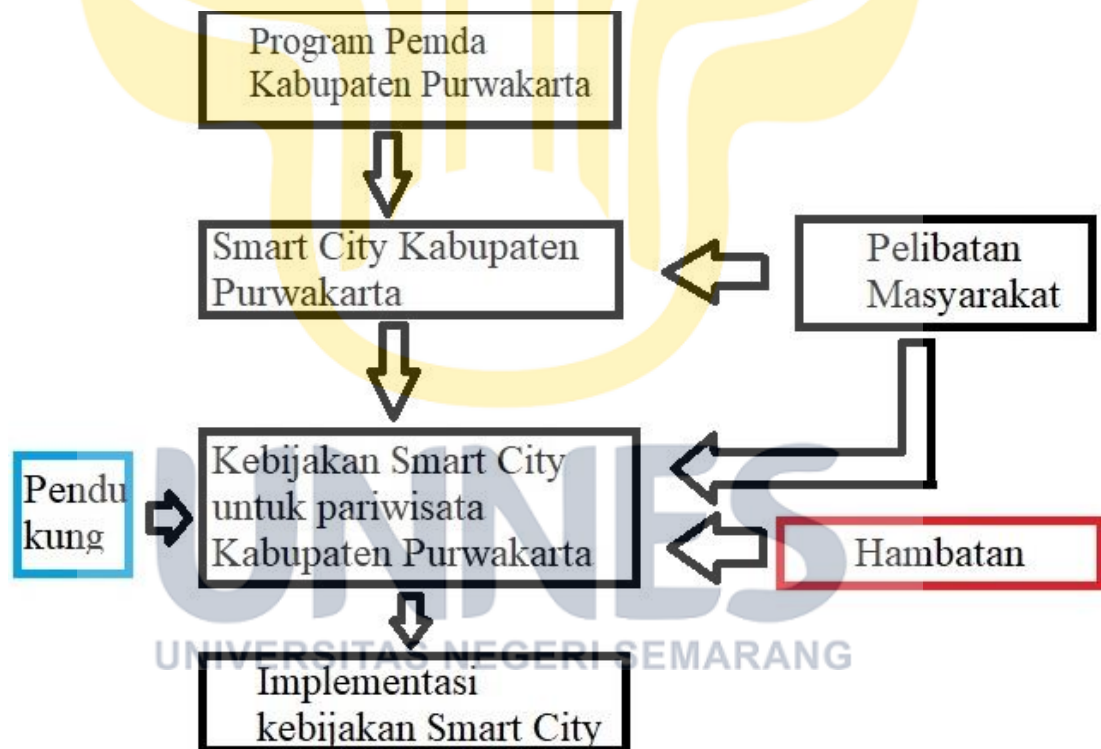
Smart city telah menjadi sebuah fenomena akhir-akhir ini. Globalisasi dan teknologi menjadi penyebab dari terbentuknya *smart city*. *Smart city* dianggap sebagai suatu bentuk kebijakan yang cocok diimplementasikan di era milenial seperti saat ini. Hal ini disebabkan karena teknologi yang maju semakin pesat, dan masyarakat yang telah melek dengan teknologi. Di sisi lain, *smart city* pun dianggap dapat memajukan kota-kota atau kabupaten-kabupaten di Indonesia.

Seperti salah satu kabupaten di Indonesia yang menerapkan kebijakan *smart city* yaitu Kabupaten Purwakarta. Kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu program unggulan karena dianggap lebih cepat, praktis, dan transparan bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta. Kebijakan *smart city* yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang mengacu pada pelayanan publik, tetapi juga pada peningkatan pariwisata Kabupaten Purwakarta.

Di dalam pembuatan kebijakan *smart city*, khususnya dalam pembuatan kebijakan *smart city* untuk meningkatkan pariwisata Kabupaten Purwakarta, pemerintah Kabupaten Purwakarta melibatkan masyarakat Purwakarta, terutama anak-anak muda Kabupaten Purwakarta. Sehingga dalam penyusunan kebijakan *smart city* pemerintah Kabupaten Purwakarta dan masyarakat Kabupaten

Purwakarta, terutama anak-anak muda, bekerjasama untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pariwisata Kabupaten Purwakarta.

Namun seperti kebijakan lainnya, kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta pun memiliki banyak hambatan dan dukungan. Hambatan tersebut seperti masih kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Purwakarta mengenai aplikasi dan pelayanan *online* pemerintah Kabupaten Purwakarta sedangkan untuk para wisatawan yang datang ke Kabupaten Purwakarta belum mengetahui mengenai aplikasi untuk memudahkan para wisatawan tersebut dalam berwisata di Kabupaten Purwakarta.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal:

1. Kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta diadopsi dari Evaluasi 100 *Smart City* pada tahun 2017 kemudian diimplementasikan pada pertengahan tahun 2017. Kebijakan *smart city* diimplementasikan di Kabupaten Purwakarta tidak hanya disebabkan oleh adanya Evaluasi 100 *Smart City* saja, tetapi juga karena adanya dorongan pemerintah kabupaten Purwakarta untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam hal kecepatan pelayanan, efisiensi pelayanan, dan efektivitas pelayanan. Implementasi kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta tidak hanya dilakukan dalam bidang administratif saja, tetapi juga diimplementasikan dalam pariwisata, atau di dalam *smart city* itu sendiri dinamakan dengan *smart branding*. Salah satu bentuk implementasi yang dilakukan dalam *smart branding* adalah dengan menciptakan dua aplikasi pariwisata yaitu Sampurasun dan Ogan Lopian. Aplikasi Sampurasun merupakan aplikasi pariwisata yang diciptakan oleh komunitas Urang Purwakarta, sedangkan Ogan Lopian merupakan aplikasi pusat komando atau *command centre* bagi warga Purwakarta juga merupakan aplikasi pariwisata Kabupaten Purwakarta.

Disporaparbud Kabupaten Purwakarta melibatkan komunitas Urang Purwakarta dalam pembuatan bentuk implementasi kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta. Komunitas Urang Purwakarta sendiri berisikan para pemuda Purwakarta.

2. Tantangan serta faktor penghambat yang dihadapi dalam pengimplemntasian kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta yaitu masih banyaknya orang-orang di dalam pemerintahan yang belum memahami mengenai teknologi yang ada, seperti belum memahami komputer, aplikasi, serta internet itu sendiri, sehingga pelayanan yang seharusnya menjadi lebih cepat, akan menjadi lebih lambat daripada seharusnya. Informasi yang terdapat di dalam aplikasi belum di-*update* sehingga masyarakat ketinggalan informasi. Masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan media sosial daripada digunakan untuk hal-hal penting lainnya. Serta kurangnya minat masyarakat terhadap sosialisasi mengenai kebijakan *smart city* dan pengimplementasian kebijakan *smart city* oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta. Masih banyak warga masyarakat Kabupaten Purwakarta, termasuk para pelaku UMKM yang tidak mengetahui mengenai kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta, mereka hanya mengetahui mengenai salah satu bentuk implementasi dari kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta, yaitu aplikasi Sampurasun, serta mereka pun belum mengetahui cara penggunaan dari aplikasi tersebut, padahal aplikasi tersebut apabila digunakan secara maksimal dapat meningkatkan

penjualan UMKM di Kabupaten Purwakarta. Sedangkan untuk faktor pendukung di dalam mengimplementasikan kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta yaitu kebutuhan akan teknologi informasi yang tinggi, animo masyarakat yang tinggi terhadap aplikasi tersebut, serta untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kabupaten Purwakarta.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan kepada Diskominfo dan Disporaparbud Kabupaten Purwakarta serta komunitas Urang Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Kepada Diskominfo dan Disporaparbud Kabupaten Purwakarta sebaiknya sosialisasi kepada masyarakat Purwakarta serta para wisatawan, baik dilakukan secara daring maupun luring, dilakukan sesering mungkin. Hal ini sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai implementasi kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta. Selain itu, salah satu bentuk implemeneasi kebijakan *smart city* yang berupa aplikasi, yaitu Ogan Lopian, seharusnya diperbaharui, sebab masih banyak masyarakat Purwakarta yang kesulitan untuk mengakses Ogan Lopian serta informasi yang diberikan pun informasi lama.
2. Kepada komunitas Urang Purwakarta sebaiknya aplikasi Sampurasun, sebagai bentuk dari implementasi kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta, diperbaharui juga, terutama

informasi-informasi yang terdapat di dalam aplikasi tersebut, agar masyarakat serta para wisatawan tidak tertinggal informasi mengenai pariwisata di Kabupaten Purwakarta.

3. Kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta dan para pelaku UMKM Kabupaten Purwakarta sebaiknya apabila dilakukan sosialisasi mengenai implementasi kebijakan *smart city* untuk menghadiri sosialisasi tersebut, terlepas dari menguntungkan atau tidaknya sosialisasi tersebut. Sebab sosialisasi ini penting untuk dihadiri agar pengimplementasian kebijakan *smart city* di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, S. Z. (2002). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Al Fatih, A. (2010). *Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Impelemntasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. Bandung: UNPAD Press.
- AR, M. (2002). *Manajemen Proses kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Statistik Indonesia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta. (2018). *Purwakarta Dalam Angka 2018*. Purwakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta.
- Bertucci, G., & Alberti, A. (2001). *Globalization and the Role of the State: Challenges*. New York: United Nations World Public Sector.
- Cahyadi, R., & Gunawijaya, J. (2009). *Pariwisata Pusaka Masa Depan bagi Kita, Alam, dan Warisan Budaya Bersama*. Jakarta: UNESCO.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta. (2018). *Masterplan Smart City Kabupaten Purwakarta*. Purwakarta: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Handoyo, Eko, dkk. (2015). *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Heryawan, H. (2006). *Analisa Pengembangan Pariwisata Indonesia: Suatu Studi Perbandingan Kebijakan Pariwisata Indonesia dengan Singapura dan Malaysia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Kumar, R. (2011). *Research Methodology*. New Delhi: SAGE Publications.
- Kodhyat, H. (1996). *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: P.T. Grasindo.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, J. L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, S., Basuki, A. M., & Prabowo, H. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan, dan Budaya*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- National Trust For Historic Preservation. (2007). *Cultural Heritage Tourism 2007 Fact Sheet*. Washington: National Trust For Historic Preservation.
- School of Distance Education. (2011). *Social Research Methods*. Malappuram: University of Calicut.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Texas Historical Commission. (2013). *Heritage Tourism Guidebook*. Texas: Texas Historical Commission.
- The *Government of the Hong Kong Special Administrative Region*. (2013). *Introduction to Tourism*. Wan Chai: The *Government of the Hong Kong Special Administrative Region*.
- Walker, L.-A., & Brooks, D. (1996). *Step-by-Step Guide to Heritage Tourism Development in the Kootenay-Boundary* *The Tourism Action Society in the Kootenays*. Kootenays: The Tourism Action Society in the Kootenays.
- Walliman, N. (2011). *Research Methods The Basics*. Oxford: Routledge.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Buku Seru.
- World Tourism Organization. (1995). *Concepts, Definitions, and Classifications for Tourism Statistics*. Madrid: World Tourism Organization.
- Yin, R. K. (2012). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.
- Jurnal:**
- Hamisi, F. N. (2013). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pembuatan Kebijakan (Suatu Studi Terhadap Musyawarah Rencana Pembangunan di Kecamatan Jailolo)*. Governance.
- Harrison, C., & Donnelly, I. A. (2011). *A Theory of Smart Cities*. *The 55th Annual Meeting of the ISSS* (pp. 1-15). Hull: International Society for the Systems Sciences.
- Hikmawati. (2013). *Partisipasi Publik Dalam Perumusan Kebijakan Publik*. *Jurnal Politik Profetik*.

- Nikkhah, H. A., & Redzuan, M. (2009). Participation as a Medium of Empowerment in Community Development. *European Journal of Social Sciences*, 170-176.
- Rahim, E. I. (2013). *Partisipasi Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi. Media Pengembangan dan Praktik Administrasi*, 17-35.
- Mariana, D. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan. *CosmoGov*, 216-229.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan *Smart City* di Kota Bandung . *Jurnal Ilmu Administrasi*, 126-138.
- Putra, H. P. (2011). Kebijakan Pemerintah Dalam Bentuk Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Fisip UMRAH*, 33-49.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1-12.
- Silberberg, T. (1995). Cultural Tourism and Business Opportunities for Museums and. *Tourism Management*, 361-365.
- Soebagyo. (2012). Strategi Pengembangan Pariwisata Di Indonesia. *Jurnal Liquidity*, 153-158.
- Widyastuti, A. R. (2010). Pengembangan Pariwisata yang Berorientasi Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan. *Jurnal Ekosains*, 69-82.
- Yuniarto, P. R. (2014). Masalah Globalisasi di Indonesia: Antara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 67-95.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Masango, R. (2001). *Public Participation in Policy-Making and Implementation with Specific Reference to The Port Elizabeth Municipality*. Muckleneuk: University of South Africa.
- Prawiraningrat, A. (2015). *Peran Singapore Tourism Board (STB) dalam Implementasi Kebijakan BOOST (Building On Opportunities To Strengthen Tourism) untuk Mengatasi Dampak Krisis Finansial Global Terhadap Sektor Pariwisata Tahun 2008-2011*. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Undang-Undang:

Kementerian Pariwisata Indonesia. (2009, Januari 16). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009*. Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pariwisata Indonesia.

Website:

Malau, S. (2013, Mei 15). 87 Persen Pulau di Indonesia Belum Berpenghuni. Disunting dari TribunNews: <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/05/15/87-persen-pulau-di-indonesia-belum-berpenghuni>

Musa, S. (2017, Desember 3). *Smart City Roadmap*. Disunting dari academia.edu: https://www.academia.edu/21181336/Smart_City_Roadmap

New York City Mayor's Office of Technology and Innovation. (2017, Desember 3). *Building a Smart + Equitable City*. Disunting dari New York City Mayor's Office: <http://www1.nyc.gov/site/forward/innovations/smartnyc.page>

Pemkab Purwakarta. (2017, Oktober 20). Purwakarta. Disunting dari Website Purwakarta: <http://www.purwakartakab.go.id/purwakarta>

Perdana, P. P. (2018, September 20). Anne Ratna Mustika Dilantik Jadi Bupati Purwakarta dalam Kondisi Hamil. Disunting dari Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2018/09/20/12182981/anne-ratna-mustika-dilantik-jadi-bupati-purwakarta-dalam-kondisi-hamil>

Prasetya, E. (2017, Agustus 19). Dari 17.504 Pulau di Indonesia, 16.056 telah diverifikasi PBB. Disunting dari Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html>

The Levin Institute - The State University of New York. (2016, December 27). *What Is Globalization?* Disunting dari Globalization 101: <http://www.globalization101.org/what-isglobalization/>